



# PILKADA, KORUPSI & HUTAN INDONESIA

Wawan Wardiana  
Direktur Litbang-KPK

Jakarta, 26 November 2020

# Masalah Pendanaan Pilkada

## Gap Antara Biaya Pilkada dan Kemampuan Harta

Total Harta Pasangan Calon tidak mencukupi biaya pilkada

Total Harta Rata-Rata :

**Rp.18.039.709.967,00**

Bahkan ada pasangan calon memiliki harta minus **Rp -15.172.000,00**



Biaya Pilkada Mahal

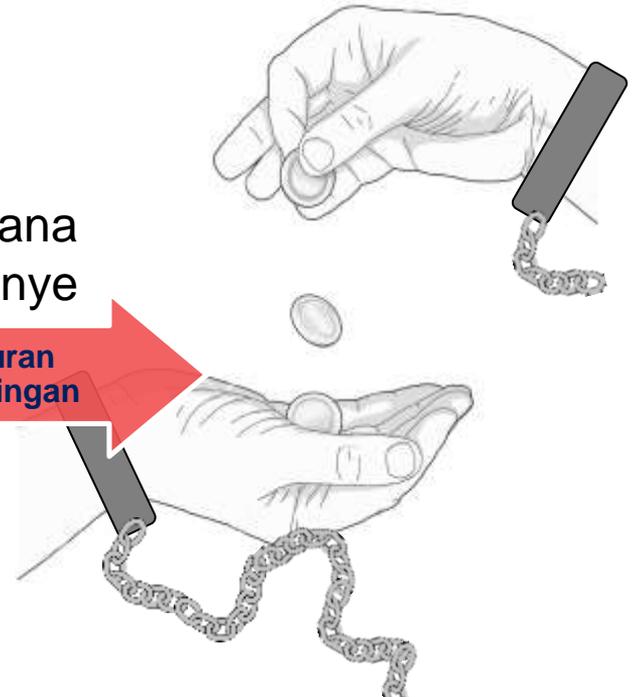
Indepth Interview:

**5-10 Milyar** Pilkada Bupati, untuk menang idealnya **65 M**

Sumbangan Dana  
Kampanye

Konsekuensi

Benturan  
kepentingan





Pilkada dibiayai oleh Sponsor



**82,3%**

2017 = 82,6%

2015 = 70,3%

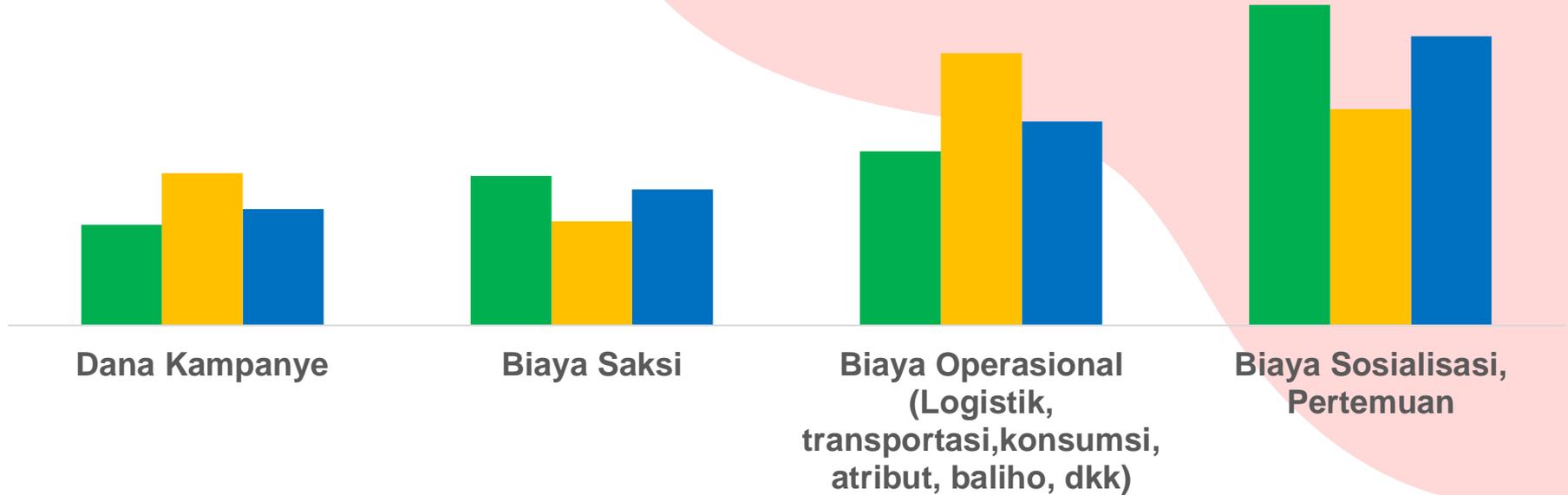
Calon kepala daerah/wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada



**Pembiayaan proses pilkada oleh Sponsor/Donatur tidak hanya terbatas pada masa kampanye**



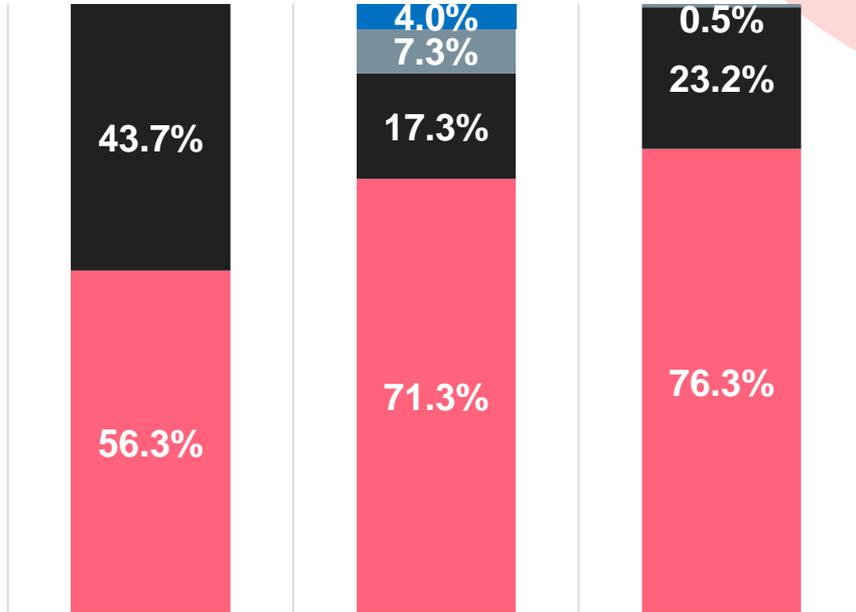
# komponen apa saja yang paling besar dalam Pendanaan Pilkada?



Biaya lainnya yang juga dinilai besar adalah Biaya Mahar (1,5%), Biaya untuk Serang Fajar (1.5%), Permintaan Bantuan Sosial (1.0%)

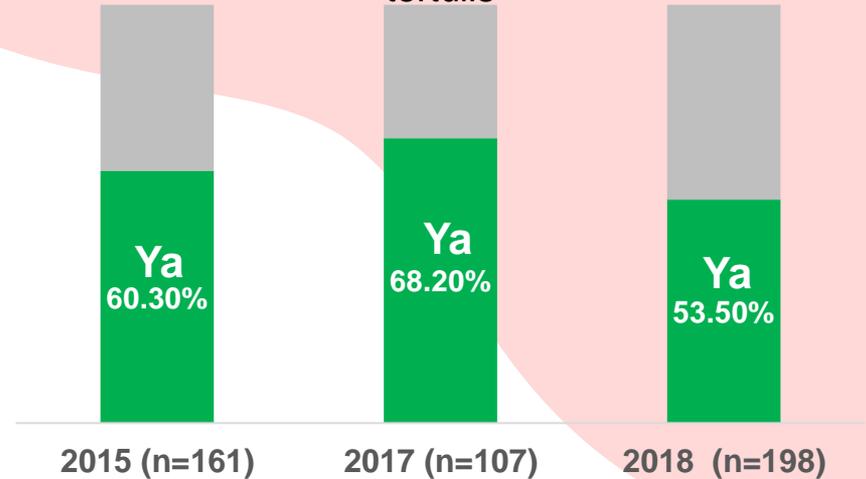
## Tidak ada Pengelolaan Benturan Kepentingan Donatur

■ Ya ■ Tidak ■ Tidak Menjawab ■ Tidak Tahu



2015 (N=286) 2017 (N=150) 2018 (N=198)

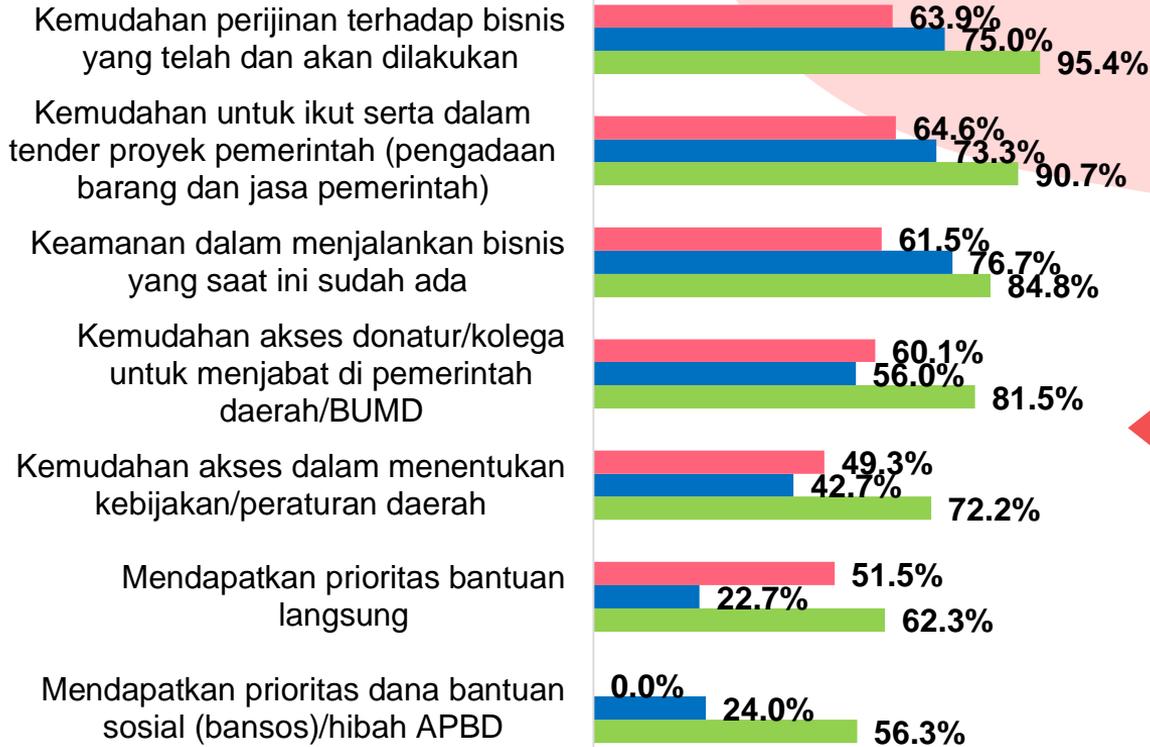
Harapan penyumbang tersebut diungkapkan secara jelas dalam bentuk lisan ataupun tertulis



*Apakah orang yang menyumbang/membantu mengharapkan balasan di kemudian hari saat para Cakada menjabat?*



# Harapan Donatur



■ 2015 (n=286) ■ 2017 (n=150) ■ 2018 (n=151)

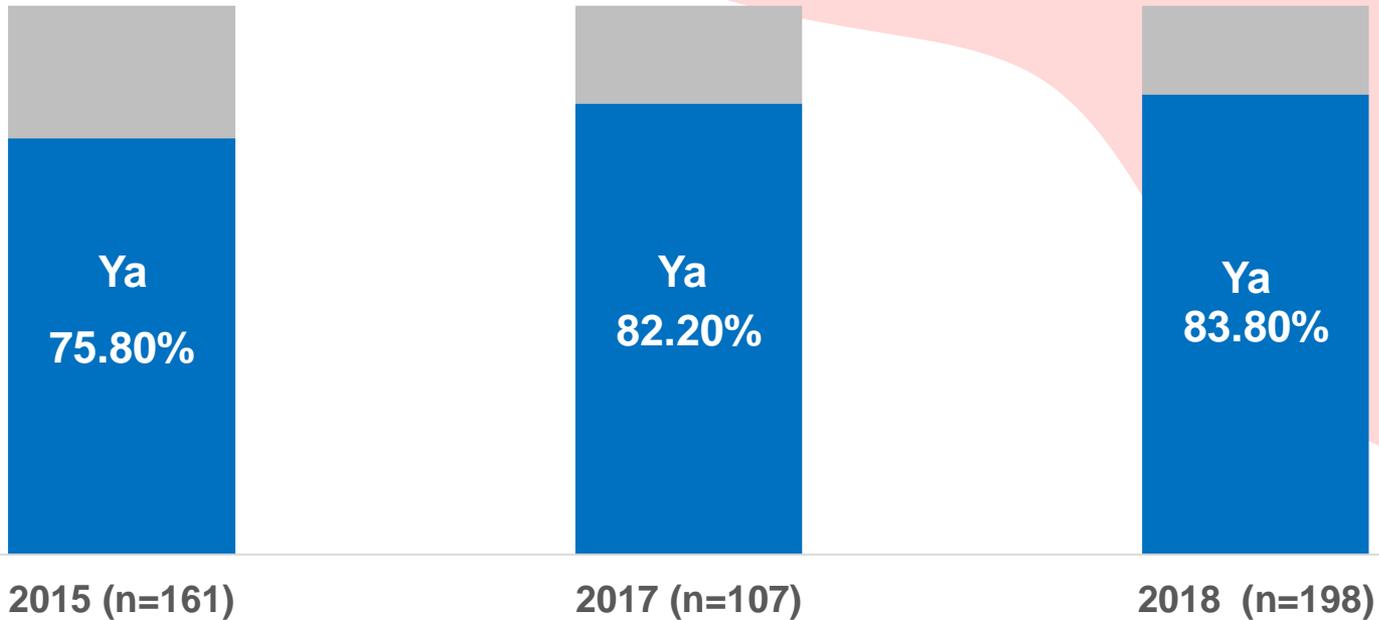


## Harapan Prioritas

1. Kemudahan Perijinan bisnis
2. Kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah
3. Keamanan dalam menjalankan bisnis



Sebagian besar Cakada akan memenuhi harapan tersebut ketika dia memenangkan pilkada/menjabat



# Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tata kelola kehutanan – kajian sistem dan kerentanan korupsi



## KAJIAN SISTEM PERENCANAAN HUTAN

## KAJIAN KERENTANAN KORUPSI SISTEM PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN

## MENCEGAH KERUGIAN NEGARA DI SEKTOR KEHUTANAN

### Perencanaan hutan

- Inventarisasi
- Pengukuhan dan penatagunaan hutan
- Alokasi peruntukan ruang

### Pemanfaatan dan pengelolaan hutan

- Perizinan
- Manajemen hutan
- Peredaran hasil hutan

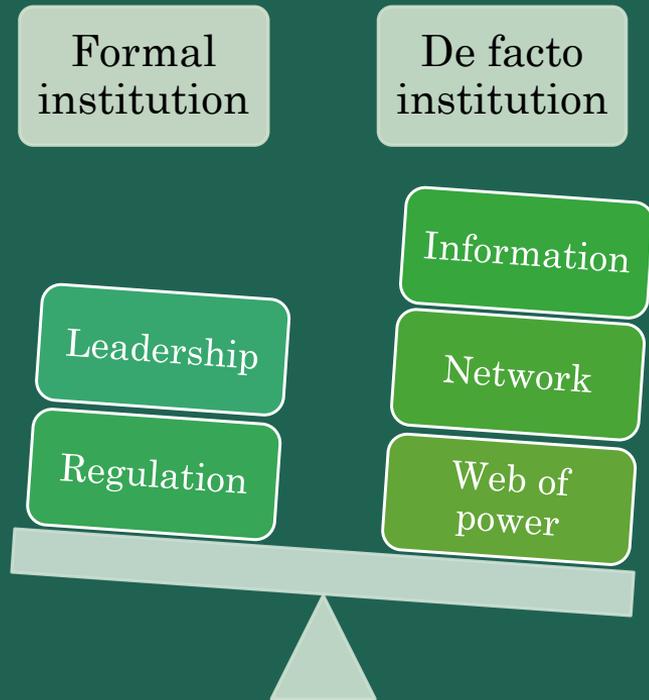
### Penegakan hukum

- Kebijakan penegakan hukum
- Sanksi

### Kebijakan fiskal hutan

- Struktur penerimaan negara
- Mekanisme akuntabilitas

# Pembelajaran pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam



*Korupsi tidak hanya berarti disfungsi pemerintah, seringkali merupakan keberadaan lembaga alternative yang mampu mempertahankan jejaring kekuasaan yang lebih berkuasa dari (secara de facto) lembaga yang legal – sementara modal sosialnya justru berasal dari administrasi negara. (State Capture Corruption)*



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN



TERIMA KASIH